



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

**PERJANJIAN
KINERJA PERUBAHAN**

2023



KATA PENGANTAR

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sub kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan, Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri dalam Negeri No. 150-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perjanjian Kinerja Perubahan disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023. Diharapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan.

Tenggarong, September 2023

Plt. Kepala Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kutai Kartanegara



M. Hatta, SE, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670815/200012 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. HATTA, SE. M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah.
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;

4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”;
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

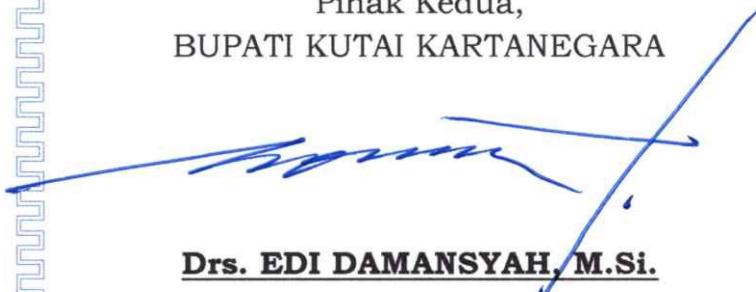
Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

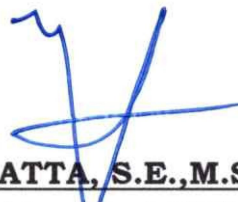
Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS



M. HATTA, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196708152000121005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA****KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkat Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	Dokumen	4
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,30
3	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	18,59
4	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar Ditempatkan	Persen	8,39
5	Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang di fasilitasi	Persen	100
6	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
7	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	Barang Milik Daerah;	berada di Pengguna Barang Milik Daerah;		
8	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil tidak diskriminatif dan Akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
9	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
10	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
11	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
12	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
13	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Pesen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
14	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100
15	Melaksanakan Manajemen Resiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
16	Melaksanakan Reviu Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
17	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Persen	100
18	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
19	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasa Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	13.335.175.775	APBD-P
2.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	300.000.000	APBD-P
3.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	525.000.000	APBD-P
4.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	12.833.400.000	APBD-P
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	300.000.000	APBD
6.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	6.429.999.798	APBD-P
7.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	7.834.869.000	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		41.558.444.573	

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS


M. HATTA, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196708152000121005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. HATTA, SE. M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE. M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Sekretariat yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah.
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;

4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”;
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

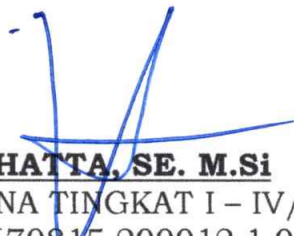
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS


M. HATTA, SE. M.Si
PEMBINA TINGKAT I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,
SEKRETARIS


M. HATTA, SE. M.Si
PEMBINA TINGKAT I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	8
2	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1
3	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Dokumen	1
4	Meningkatnya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian dengan Baik	Jumlah Aparatur Sipil Negara	Orang	124
5	Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Paket	12
6	Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit BMD yang diadakan	Unit	100
7	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia dengan Baik	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12
8	Meningkatnya Fasilitasi dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Unit	30

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		Daerah		
9	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
10	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
11	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil tidak diskriminatif dan Akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
12	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
13	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
14	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	Perangkat Daerah;			
15	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
16	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Pesen	100
17	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100
18	Melaksanakan Manajemen Resiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
19	Melaksanakan Reviu Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
20	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Persen	100
21	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
22	Tercapainya Kinerja	Persentase Capaian	Persen	100

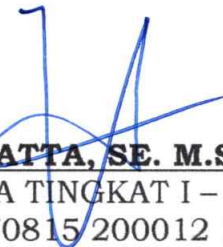
No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;		
23	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasa Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

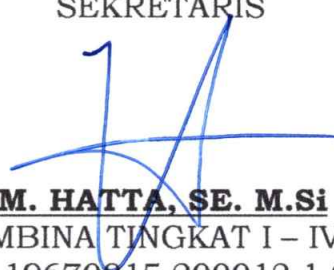
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	APBD-P
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.480.565.320	APBD-P
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	82.200.000	APBD-P
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	767.800.000	APBD-P
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	754.700.000	APBD-P
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.247.359.000	APBD-P
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.126.509.524	APBD-P
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.041.931	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		13.335.175.775	

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS


M. HATTA, SE. M.Si
PEMBINA TINGKAT I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,
SEKRETARIS


M. HATTA, SE. M.Si
PEMBINA TINGKAT I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. SYARIFAH ROSITAH, ST, MT

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PEMBERDAYAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE. M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Bidang Pembinaan Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah.
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;

4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di Perangkat Daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”;
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

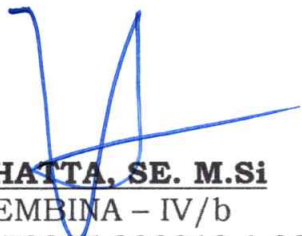
1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA DINAS



M. HATTA, SE. M.Si

PEMBINA – IV/b

NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PEMBERDAYAAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA



Hj. SYARIFAH ROSITAH, ST, MM

PEMBINA – IV/a

NIP. 19721028 200112 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Orang	535
		Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia	Lembaga	11
		Jumlah perusahaan kecil yang produktif	Perusahaan	25
2	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Jumlah Layanan Antar Kerja	Layanan	80
		Jumlah informasi pasar kerja	Event	1
		Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah	Dokumen	1
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
4	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
5	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	tidak diskriminatif dan Akuntabel;			
6	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
7	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
8	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
9	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
10	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Pesen	100
11	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
12	Melaksanakan Manajemen Resiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
13	Melaksanakan Reviu Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
14	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Persen	100
15	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
16	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
17	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasa Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

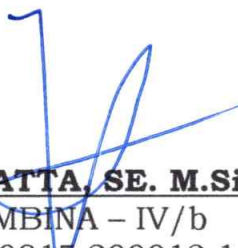
KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	12.733.400.000	APBD-P
2.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	50.000.000	APBD-P
3.	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	50.000.000	APBD-P
4.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	6.089.999.798	APBD-P
5.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	340.000.000	APBD-P
6.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	300.000.000	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		19.563.399.798	

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA DINAS


M. HATTA, SE. M.Si

PEMBINA – IV/b

NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PEMBERDAYAAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA


Hj. SYARIFAH ROSITAH, ST, MM

PEMBINA – IV/a

NIP. 19721028 200112 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA WARDANA, AP, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL,
SYARAT-SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE. M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah.
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;

4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di Perangkat Daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”;
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA DINAS

M. HATTA, SE. M.Si

PEMBINA – IV/b

NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL, SYARAT-SYARAT KERJA DAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

HENDRA WARDANA, AP, MM

PEMBINA – IV/a

NIP. 19760218 199603 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan	Perusahaan	28
		Jumlah Fasilitas Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan	Perusahaan	60
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
4	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil tidak diskriminatif dan Akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
5	Mewujudkan	Tingkat Kepatuhan	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023		
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
7	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
8	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Pesen	100
10	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100
11	Melaksanakan Manajemen Resiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
12	Melaksanakan Reviu Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
13	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Persen	100
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
15	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
16	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasa Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

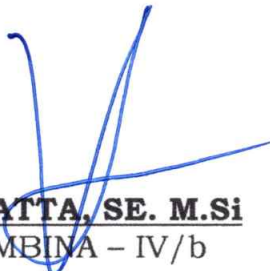
KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	394.340.000	APBD-P
2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	7.440.529.000	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		7.834.869.000	

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA DINAS


M. HATTA, SE. M.Si

PEMBINA – IV/b

NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL, SYARAT-SYARAT KERJA DAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA


HENDRA WARDANA, AP, MM

PEMBINA – IV/a

NIP. 19760218 199603 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUKMAN, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PENYIAPAN KAWASAN, PEMBANGUNAN
DESA & PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE. M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Bidang Penyiapan Kawasan, Pembangunan Desa dan Permukiman Transmigrasi yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah.
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;

4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di Perangkat Daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”;
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA DINAS


M. HATTA, SE. M.Si

PEMBINA – IV/b

NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENYIAPAN KAWASAN,
PEMBANGUNAN DESA DAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI


LUKMAN, S.Sos, M.Si

PEMBINA – IV/a

NIP. 19720516 200801 1 016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan transmigrasi baru	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	Kawasan	1
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
4	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil tidak diskriminatif dan Akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
5	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	(LHKASN);			
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
7	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
8	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Pesen	100
10	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100
11	Melaksanakan Manajemen Resiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
12	Melaksanakan Reviu Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
13	Melaksanakan Tata	Jumlah Kegiatan	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	Kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”	Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja		
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
15	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
16	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasa Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

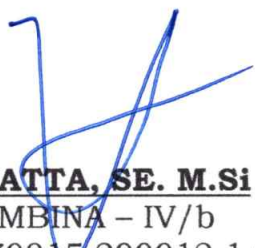
KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	525.000.000	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		525.000.000	

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA DINAS


M. HATTA, SE. M.Si

PEMBINA – IV/b

NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENYIAPAN KAWASAN,
PEMBANGUNAN DESA DAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI


LUKMAN, S.Sos, M.Si

PEMBINA – IV/a

NIP. 19720516 200801 1 016



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SAIFUL BAHRI, M.H

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESA & KAWASAN
TRANSMIGRASI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE. M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Bidang Pengembangan Desa dan Kawasan Transmigrasi yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah.
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;

4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di Perangkat Daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”;
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS


M. HATTA, SE. M.Si
PEMBINA – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESA & KAWASAN TRANSMIGRASI


Drs. SAIFUL BAHRI, M.H
PEMBINA – IV/a
NIP. 49671006 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang Dikembangkan	Kawasan	1
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
4	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil tidak diskriminatif dan Akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
5	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	(LHKASN);			
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
7	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
8	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Pesen	100
10	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100
11	Melaksanakan Manajemen Resiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
12	Melaksanakan Reviu Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
13	Melaksanakan Tata	Jumlah Kegiatan	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	Kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”	Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja		
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
15	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
16	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasa Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

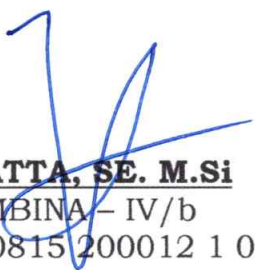
KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	300.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		300.000.000	

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA DINAS


M. HATTA, SE. M.Si
PEMBINA – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESA & KAWASAN TRANSMIGRASI


Drs. SAIFUL BAHRI, M.H
PEMBINA – IV/a
NIP. 19671006 200012 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARIANI, S.Sos

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE. M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah.
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;

4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
9. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”;
10. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
11. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
12. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



M. HATTA, SE. M.Si
PEMBINA – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KETATALAKSANAAN



MARIANI, S.Sos
PENATA Tk I – III/d
NIP. 19710724 199303 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1
3	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	5
4	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	1
5	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	1
6	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	4
7	Tersedianya Penyediaan Bahan/Materai	Jumlah Paket Bahan/Material	Paket	1
8	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	87
10	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit BMD yang diadakan	Unit	100
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
12	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12
13	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	12

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		Pelayanan Umum Kantor		
14	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	30
15	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1
16	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
17	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
19	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
20	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
21	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
23	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Pesen	100

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
24	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100
27	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Persen	100
28	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
29	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
30	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasa Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

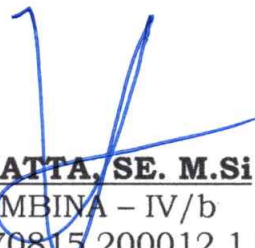
SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	82.200.000	APBD-P
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.700.000	APBD-P
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.000.000	APBD-P
4.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	APBD-P
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	APBD-P
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	APBD-P
7.	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000	APBD-P
8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	APBD-P
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	APBD-P
10.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.247.359.000	APBD-P
11.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	APBD-P
12.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	270.000.000	APBD-P
13.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.867.000	APBD-P
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	782.642.524	APBD-P
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	276.041.931	APBD-P

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		3.686.810.455	

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


M. HATTA, SE. M.Si
PEMBINA – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KETATALAKSANAAN


MARIANI, S.Sos
PENATA Tk I – III/d
NIP. 19710724 199303 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONI NURHABIBI, SE, M.Si

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE. M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Jabatan yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah.
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
6. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
7. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
8. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”;
9. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
11. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
12. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,

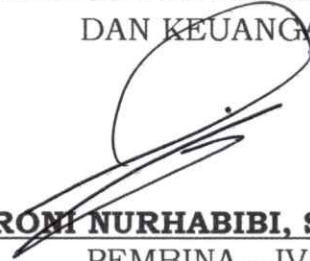
SEKRETARIS



M. HATTA, SE, M.Si
PEMBINA – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,

PERENCANA AHLI MUDA SUB
KOORDINATOR PENYUSUNAN PROGRAM
DAN KEUANGAN



RONI NURHABIBI, SE, M.Si
PEMBINA – IV/a
NIP. 19800330 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5
2	Melaksanakan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3
3	Tersediannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	73
4	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
5	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
6	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
7	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
8	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Pesen	100
10	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100
11	Melaksanakan Manajemen Resiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
12	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Persen	100
13	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
14	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
15	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasa Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

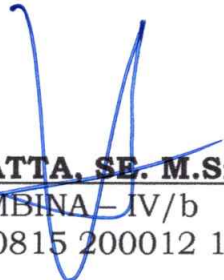
SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000	APBD-P
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	APBD-P
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.480.565.320	APBD-P
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	150.000.000	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		8.880.565.320	

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS

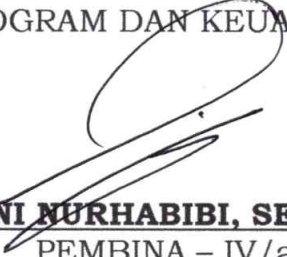

M. HATTA, SE, M.Si

PEMBINA – IV/b

NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,

PERENCANA AHLI MUDA SUB
KOORDINATOR PENYUSUNAN
PROGRAM DAN KEUANGAN


RONI NURHABIBI, SE, M.Si

PEMBINA – IV/a

NIP. 19800330 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. ERNAWATI, SE

Jabatan : ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SUB
KOORDINATOR BAGIAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE. M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Jabatan yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah.
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
6. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
7. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
8. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”;
9. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
11. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
12. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

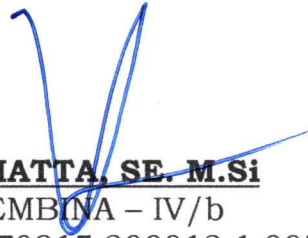
1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS



M. HATTA, SE, M.Si
PEMBINA – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,

ANALISI SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR SUB KOORDINATOR BAGIAN
KEPEGAWAIAN



Hj. ERNAWATI, SE
PENATA Tk I – III/d
NIP. 19710724 199303 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Melaksanakan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersediannya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Orang	124
2	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3
3	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5
4	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	73
5	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35
6	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
7	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
8	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
9	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan	Persen	100

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Aplikasi e-Pantau		
10	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Pesen	100
11	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100
12	Melaksanakan Manajemen Resiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
13	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Persen	100
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
15	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
16	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasa Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

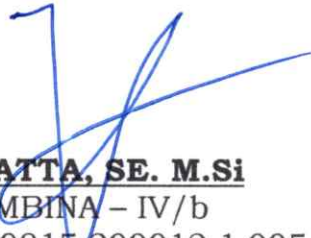
SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	267.710.000	APBD-P
2.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.000.000	APBD-P
3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105.000.000	APBD-P
4.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	APBD-P
5.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	245.090.000	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		767.800.000	

Kutai Kartanegara, 29 September 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS


M. HATTA, SE, M.Si
PEMBINA - IV/b
NIP. 19670815/200012 1 005

Pihak Pertama,

ANALISI SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR SUB KOORDINATOR
BAGIAN KEPEGAWAIAN


Hj. ERNAWATI, SE
PENATA Tk I - III/d
NIP. 19710724 199303 2 004



PENUTUP

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 7 (Tujuh) Program dan 45 (Empat Puluh Lima) Sub Kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023 yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 41.558.444.573,-

Sehubungan dengan telah tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan ini, apabila dalam periode pelaksanaan Perjanjian Kinerja ini tidak dapat dilaksanakan maka ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan situasi dan kondisi.

Tenggarong, September 2023

Plt. Kepala Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja



M. Hatta, SE, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670815 200012 1 005

